

KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CIAMIS

Muhammad Reihan Gifary¹, Aan Anwar Sihabudin², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : reihangifary21@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu Daerah. Dengan adanya pariwisata ini Pemerintah Daerah mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu Daerah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menarik sektor lain. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ditemukan permasalahan yaitu kurangnya himbauan khusus mengenai kebersihan dan kelestarian alam dengan bebas dari polusi dan sampah di sekitar area wisata, sehingga banyak wisatawan dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Ciamis ?. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Selanjutnya Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara alamiah dan akademis. (Arikunto, 2012:115). Data penelitian adalah Thinks knowing or assumed', yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa perkembangan yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis sudah berjalan meskipun belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa yang menjadi penghambat dalam proses pengembangan pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata tetap melakukan kinerjanya dengan baik dan selalu melakukan sosialisasi kepada pegawai agar meminimalisir keterhambatan dalam menjalankan tugasnya supaya hasilnya maksimal.

Kata Kunci : Kinerja, Pariwisata, Pengembangan Kepariwisata

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya

sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan

kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan Nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Tempat wisata di Indonesia mempunyai daya tarik dengan unsur kebudayaan di daerahnya masing-masing, kebanyakan wisatawan asing tertarik dengan tempat wisata tersebut, karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi mereka, dengan adanya tempat wisata kebanyakan daerah-daerah di Indonesia kini berbondong-bondong untuk melestarikan dan mengembangkan potensi wisata Daerahnya masing-masing. Untuk melestarikan dan mengembangkan potensi wisata tersebut. Pemerintah Daerah dituntut menjaga potensi wisata agar banyak pula pemasukan di Daerah, Dinas Pariwisata sekarang ini banyak melakukan promosi potensi pariwisata untuk itu peran dan kinerja Dinas pariwisata sangat diperlukan. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu Daerah.

Untuk melestarikan dan mengembangkan potensi wisata tersebut. Pemerintah Daerah dituntut menjaga potensi wisata agar banyak pula pemasukan di Daerah, Dinas Pariwisata sekarang ini banyak

melakukan promosi potensi pariwisata untuk itu peran dan kinerja Dinas pariwisata sangat diperlukan. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu Daerah. Dengan adanya pariwisata ini Pemerintah Daerah mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu Daerah akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menarik sektor lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan, Bahwa kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan hidup dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan pengusaha.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat,

yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan di kelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 paragraf 3 pasal 7 dijelaskan mengenai pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis yang pada intinya bahwa pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui mekanisme penataan kawasan dan jalur pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, serta penataan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Untuk merealisasikan program pengembangan destinasi wisata tersebut harus dilakukan melalui kemitraan yang baik antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat terkait.

Potensi wisata yang bisa dikembangkan yaitu potensi wisata

budaya dengan adanya nilai-nilai sejarah yang tinggi serta situs cagar budaya peninggalan kerajaan Sunda pada zaman dahulu. Potensi tersebut memiliki peluang yang sangat baik untuk menarik minat para wisatawan selain itu potensi tersebut dapat menjadi salah satu daya dukung pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja

Definisi Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan

kemudian General Accounting office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

2. Kualitas Layanan,

Cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit Lenvine. Oleh sebab itu, responsibilitas bias saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pariwisata

Sebagai aktivitas yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, pariwisata banyak menarik minat akademik dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya. Jovicic (1998) dalam (Sedarmayanti, 2014:1), mengusulkan agar; Kajian pariwisata dikembangkan sebagai disiplin tersendiri, yang disebut *tourismology*. Hal ini didasarkan alasan bahwa pariwisata sebagai fenomena kompleks tidak dapat dipahami secara komprehensif dengan menggunakan

berbagai pespektif disiplin ilmu yang ada sekarang.

Sedarmayanti (2014:7), mengemukakan Kepariwisata adalah : “Sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota”.

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari: “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan “ata” berarti pergi terus-terusan, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah sebuah upaya memajukan secara terus menerus pariwisata. Dalam konteks pariwisata, pembangunan dan pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan strategis atau sistematis sebagaimana dikatakan Pitana dan Diarta (2009: 108-110), yaitu:

1. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki.

2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru.
 3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil sangat tergantung dari kualitas informasi yang dikumpulkan.
 4. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan masa kini, baik yang menyangkut organisasi itu sendiri maupun lingkungan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kehidupan organisasi, dan
 - b. Informasi yang dapat membantu perencanaan memberikan pikiran masa depan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT.
 5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
 6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
 7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.
 8. Mengimplementasikan rencana.
 9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.
- Sunaryo (2013: 101) mengemukakan pengertian dari destinasi wisata yaitu:
- Destinasi wisata dimaksudkan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- Untuk menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata menurut Soemardjan dalam (Sedarmayanti, 2014 :23) dijelaskan bahwa:
- “Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan

pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata”.

Dalam rangka optimalisasi manfaat dari pengembangan pembangunan suatu objek wisata, maka dalam proses tersebut dikenal strategi pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat bersama-sama dengan pihak Pemerintah Daerah setempat. Suansri dalam (Sunaryo, 2013:142) mengemukakan lima dimensi pengembangan kepariwisataan yang merupakan aspek utama dalam rencana pembangunan kepariwisataan di Indonesia yaitu dimensi Ekonomi, dimensi Sosial, dimensi Budaya, dimensi Lingkungan dan dimensi Politik.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kepariwisata

Menurut Sunaryo, (2013:144) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang

menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Kegiatan dan pengembangan kepariwisataan melibatkan berbagai sektor kehidupan dan sektor pembangunan atau seringkali disebut pembangunan multidimensional yang melibatkan sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pariwisata mempunyai pengaruh atau dampak cukup luas, baik terhadap sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun politik. Dampak tersebut akan bersifat positif apabila direncanakan secara baik dan sebaliknya akan memberikan dampak negatif apabila tidak direncanakan dan dipersiapkan secara matang.

Richardson dan Fluker (2004) dalam (Sedarmayanti, 2014 : 155-159), menyatakan:

1. Dampak Ekonomi Pariwisata
WTO mengidentifikasi dampak pariwisata bagi perekonomian sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya permintaan produk pertanian lokal
 - b. Memacu perkembangan lokasi/lahan kurang produktif
 - c. Menstimulasi minta dan permintaan akan produk-produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah

- d. Mendorong perkembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru
 - e. Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah
2. Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan
- Dampak pariwisata terhadap lingkungan diantaranya :
- a. Dampak dari penggunaan alat transportasi
 - b. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata
 - c. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata
3. Dampak Sosial-Budaya Pariwisata
- Beberapa faktor yang mempengaruhi dampak sosial-budaya pariwisata :
- a. Jumlah wisatawan
 - b. Tipe wisatawan
 - c. Tahap perkembangan pariwisata
 - d. perbedaan norma budaya
 - e. jumlah penduduk luar daerah yang melayani kebutuhan pariwisata
 - f. perilaku lembaga pemerintah terhadap pariwisata
 - g. kebijakan dalam penyebaran wisatawan
 - h. pemasaran dan citra yang dibentuk lewat pemasaran

METODE

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Kepala Dinas sebanyak 1 orang, Sekertaris Dinas sebanyak 1 orang, Kasubag Kepegawaian dan

Umum sebanyak 1 orang, Kasubag Perencanaan dan keuangan sebanyak 1 orang, dan Masyarakat sebanyak 2 orang. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan model interaktif, yaitu : (1). Reduksi data; (2). Penyajian data; (3). Penarikan kesimpulan /verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka berikut adalah rangkuman dari narasumber berdasarkan indikator:

1. Dampak Ekonomi Pariwisata

a. Memacu perkembangan lokasi dan lahan kurang produktif menjadi objek wisata baru

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa yang di dapat oleh pengurus Dinas Pariwisata, dimana kurangnya kinerja Dinas Pariwisata dalam mengembangkan suatu program usaha yang direncanakan, dan masih dalam tahap perkembangan

b. Mendorong perkembangan wilayah dan menciptakan kawasan ekonomi baru

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa adanya perkembangan Dinas Pariwisata dalam mendorong Perkembangan wilayah dan kawasan ekonomi baru perlu ditingkatkan lagi dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat sehingga mempermudah Dinas Pariwisata dalam menyelesaikan rencananya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengurus Dinas Pariwisata.

c. Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah sudah dilakukan namun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pengurus Dinas Pariwisata kurang dalam pendekatan terhadap masyarakat dan sebagian masyarakat masih ragu terhadap Dinas Pariwisata karena masyarakat kurang memahami terkait penyebaran infrastruktur sehingga terjadinya masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap Dinas Pariwisata. Apabila salah satu anggota Dinas melakukan sosialisasi dengan secara rutin maka masyarakat secara bertahap akan mengerti maksud dan tujuan Dinas Pariwisata dalam penyebaran infrastruktur dan dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata.

2. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan

a. Dampak dari penggunaan alat transportasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Dinas Pariwisata dapat mencapai sasaran yang terarah dalam mengembangkan penggunaan alat transportasi di Kabupaten Ciamis hasilnya cukup baik, hal ini karena Dinas pariwisata berperan penting dalam mengembangkan suatu program sehingga banyak respon baik wisatawan maupun masyarakat mengenai penggunaan alat transportasi di Kabupaten Ciamis.

b. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Dinas Pariwisata dalam pembangunan fasilitas pariwisata, diperoleh gambaran bahwa Dinas Pariwisata dapat memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan fasilitas dan mungkin tujuan dari Dinas Pariwisata sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya masih memiliki kekurangan dalam hal pembangunan fasilitas, sehingga banyak masyarakat mengeluh atau ketidak tahuan mengenai fasilitas yang ada di suatu objek wisata. Terdapat upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan melakukan sosialisasi dan survey langsung, dan lebih meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pariwisata supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Dinas Pariwisata.

c. Dampak dari pengoprasian industri pariwisata

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengoprasian industri pariwisata adanya ketepatan tindakan dalam mengembangkan industri pariwisata sudah dilakukan dengan baik, meskipun masih banyak masyarakat yang memanfaatkan adanya pengoprasian industri dan masih butuh bimbingan. Dalam pengoprasian industri sudah berjalan dengan baik, namun diperlukan sosialisasi dengan masyarakat agar bisa membantu berpartisipasi dengan Dinas.

3. Dampak Sosial-Budaya Pariwisata

a. Jumlah wisatawan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai jumlah wisatawan, adanya program-program yang belum terlaksana sehingga memperlambat kinerja Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Ciamis dan mengalami penurunan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yaitu mensosialisasikan dan mempromosikan suatu objek wisata kepada wisatawan dan masyarakat agar jumlah wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke-tahun.

b. Perilaku lembaga pemerintah terhadap pariwisata

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai perilaku lembaga pemerintah terhadap pariwisata sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada keluhan dari masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekitar objek wisata, Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pariwisata yaitu memberi arahan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pariwisata agar masyarakat sekitar tidak merusak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

c. Kebijakan dalam penyebaran wisatawan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai adanya kebijakan penyebaran wisatawan, Dinas Pariwisata sudah menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi kebijakan tersebut akan susah diterapkan di masyarakat sehingga dibutuhkan sosialisasi kembali mengenai

penyebaran wisatawan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata mengenai kebijakan dalam penyebaran wisatawan, Pengurus Dinas melakukan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan sehingga masyarakat paham terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas tersebut.

d. Pemasaran dan citra yang dibentuk lewat pemasaran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemasaran dan citra yang dibentuk lewat pemasaran sudah berjalan dengan baik, Dinas Pariwisata selalu melakukan sosialisasi dan mengadakan kegiatan sehingga dapat membantu menyebarkan informasi terkait dengan objek wisata tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pengurus Dinas Pariwisata selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk membantu menyebarluaskan informasi secara rutin tentang pariwisata dan mengiklankan suatu objek wisata di website Dinas Pariwisata sehingga para wisatawan tertarik dengan informasi yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengembangan Kepariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari tanggapan informan yang sebagian besar atau sebanyak 10 indikator dinyatakan telah dilaksanakan

dengan baik, sedangkan sebagian kecil atau sebanyak 3 indikator masih kurang. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan tiga dimensi mengembangkan kepariwisataan seperti belum merata dalam penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah, belum optimalnya terkait pengoprasian industri pariwisata dan masih kurangnya jumlah wisatawan terkait minat wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis berupa kurangnya himbauan khusus mengenai kebersihan dan kelestarian alam dengan bebas dari polusi dan sampah disekitar area wisata, sehingga banyak wisatawan dengan seenaknya membuang sampah sembarangan, Kurang adanya pembinaan dan pengarahan tentang potensi di area wisata kepada pengelola, sehingga petugas pengelola objek wisata setempat terkadang mempersilahkan wisatawan masuk tanpa membayar retribusi terlebih dahulu karena wisatawan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan atau mengenali petugas pengelolanya,

Kurangnya perhatian tentang kelestarian lingkungan flora dan fauna sehingga banyak flora dan fauna yang berada dilingkungan objek wisata terancam keberadaannya.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Pihak Dinas menempatkan pegawai di semua lokasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan di area wisata serta menempelkan pamflet-pamflet himbauan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam di lingkungan sekitar, pihak Dinas Pariwisata berusaha mengadakan pelatihan kepada pengelola agar lebih mengetahui potensi wisata, Dinas Pariwisata selalu menjaga dan meningkatkan kelestarian flora dan fauna di sekitar area objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti, Gumelar. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung : Refika AditamaYA Ghani. 2017. Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4 (1).
- Hardiyanto. (2018). “*Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan*”. UNS
- Hairul Anwar. (2019). “*Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dalam*

Empromosikan Pariwisata".
Universitas Muhammadiyah
Malang.

Ni Komang Sri Wulandari. (2014).
*"Peran Sektor Pariwisata
Dalam Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tabanan"*. Skripsi
Universitas Atma Jaya.
Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun
2009, tentang kepariwisataan.

Undang-Undang No 25 Tahun 2000
tentang program Pembangunan
Nasional